



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PATIKRAJA
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PATIKRAJA**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Patikraja, Januari 2022

Camat Patikraja

Drs. LENDRA YUSPI, M.Si.

NIP 19641111 199803 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	13
C. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
D. Rencana Anggaran Tahun 2021	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Indikator Kerja Utama	19
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis ...	24
C. Akuntabilitas Keuangan	30
D. Prestasi dan Penghargaan	33
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Patikraja Tahun 2021
- Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kecamatan Patikraja Tahun 2021
- Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Patikraja Tahun 2021
- Tabel 2.4. Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021
- Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- Tabel 3.3. Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- Tabel 3.4. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021
- Tabel 3.5. Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2021
- Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021
- Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Patikraja tahun 2021
- Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2021
- Tabel 3.9. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2021
- Tabel 3.10. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Patikraja

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Patikraja Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Patikraja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Patikraja Tahun 2021. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Patikraja

a. *Luas Wilayah*

Wilayah Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas seluas **43,23 km²**, Kecamatan Patikraja berada dibagian tengah Kabupaten Banyumas. Kecamatan Patikraja sebagian besar memiliki topografi wilayah berupa dataran rendah bergelombang dan perbukitan tak teratur dibagian utara sebagai depresi Serayu. Ketinggian wilayah Kecamatan Patikraja antara 40-300 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertingginya berada di Bukit Payung (312 Mdpl di perbatasan Desa Karangendep dengan Kecamatan Rawalo. Sejumlah bukit lainnya yaitu Bukit Cimelang, Bukit Gelap, Bukit Kubang dan Bukit Jaro. Kecamatan Patikraja merupakan wilayah pertemuan sejumlah sungai yang cukup besar diantaranya Kali Serayu, Kali Logawa, Kali Rajut, dan Kali Banjaran sebelum memotong Pegunungan Serayu Selatan dan berakhir ke Samudera Hindia. Kecamatan Patikraja yang beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 25 - 32 derajat Celcius. Di Kecamatan Patikraja terdapat 13 desa, 2 dusun, 68 RW, dan 321 RT.

b. *Kondisi Demografi*

Kecamatan Patikraja dengan jumlah penduduk sebesar 64,761 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 32.503 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 32.258 jiwa.

c. *Pegawai pada Kecamatan Patikraja*

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Patikraja pada tahun 2021 adalah sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 11 orang
- PTT/Tenaga kontrak : 10 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
 4. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada bupati;
 5. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
 6. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
7. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi :
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
9. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
10. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

2. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
3. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
5. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bagian yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);

- d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

3. Seksi Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
- b. Fasilitasi kerja sama desa;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
- f. Pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa;

- g. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- h. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
- i. Inventarisasi data rupa bumi;
- j. Fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
- k. Inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
- l. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan meliputi :

- a. Pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan insidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan non perizinan, meliputi : pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- e. Pengawasan obyek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
- f. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
- g. Pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di Kecamatan;

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi ;

- a. Sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
- b. Efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- d. Pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi :

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;

- b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
- c. Fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
- d. Fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
- e. Inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
- f. Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi :

- a. Fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. Inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati melalui :
 - i. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - ii. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- h. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- i. Pendampingan penanganan bencana;
- j. Fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- k. Fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan HBN;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Patikraja tahun 2021 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

D. Rencana Anggaran Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Patikraja sesuai dengan Renstra Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 adalah terintegrasi dalam Visi Kepala Daerah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan Kecamatan Patikraja adalah Misi I Kepala Daerah yaitu : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

Visi dan misi Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas 2018- 2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Patikraja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Patikraja Tahun 2021

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif 2. Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patikraja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Mewujudkan kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan.	Formulasi : Hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perhitungan : non kumulatif Sumber data : Laporan Hasil Survei Masyarakat (IKM)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Patikraja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PATIKRAJA TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	85
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif 2. Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %

3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Desa	1. Persentase LINMAS terbina	100 %
	2. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	85 %
	3. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100 %
	4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	100 %
	5. Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %
	6. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	100 %

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Patikraja pada tahun 2021 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Patikraja setelah perubahan sebesar Rp. 1.975.761.123,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 1.975.761.123,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp 0,-. Untuk anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 1.384.336.605,-. Dan Belanja Langsung sebesar Rp. 591.424.518,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	1.893.984.803
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	17.114.900
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa.	20.706.000
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	5.037.920
5. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.917.500
Jumlah	1.975.761.123

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Patikraja melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Patikraja Tahun 2021.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Patikraja Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Index	84	84	100,6
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik.	%	100	100	100
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum.	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

6. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes.	%	100	100	100
7. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
	2. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
	3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100
	4. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100

Dari 7 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Patikraja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	7	10
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	100,6					Sangat Tinggi
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100					Sangat Tinggi
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik.	100					Sangat Tinggi
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100					Sangat Tinggi

5. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum.	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100					Sangat Tinggi
6. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes.	100					Sangat Tinggi
7. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100					Sangat Tinggi
	2. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100					Sangat Tinggi
	3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100					Sangat Tinggi
	4. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100					Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Patikraja dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2021 setelah dilaksanakan review atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	1 indikator
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.	1 indikator
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	1 indikator
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	1 indikator
5.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum.	1 indikator
6.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	1 indikator
7.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.	4 indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	Indek	83	83,71	100,85	84	84	100,6
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	85	85	100	100	100	100
3. Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	1. Persentase LINMAS terbina	%	80	80	100			
	2. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	75	75	100			
	3. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100			
	4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	90	92,8	103,1			
	5. Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100			
	6. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	%	90	90	100			
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani dengan baik.	%				100	100	100

5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.	%				100	100	100
6. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum.	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.	%				100	100	100
7. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes.	%				100	100	100
8. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.	1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%				100	100	100
	2. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%				100	100	100
	3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%				100	100	100
	4. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%				100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dengan sasaran program Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima adalah sebagai berikut :

1. Semakin lengkapnya sarana dan prasarana/fasilitas Pelayanan di Kecamatan.
2. Semakin meningkatnya kualitas SDM para Pelaksana Pelayanan Kecamatan.
3. Tersusunnya standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kendala server dari pusat karena pelayanan sekarang berbasis online.
2. Banyak pemohon yang masih rendah kemampuan IT nya padahal sekarang semua layanan administrasi kependudukan dilaksanakan secara online.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memberikan Sosialisasi layanan kependudukan yang terus menerus dan berkesinambungan.
2. Publikasi informasi layanan kependudukan.
3. Inovasi pelayanan publik yang mendukung peningkatan capaian kepemilikan administrasi kependudukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dengan sasaran program meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dan Koordinasi antara Kecamatan dengan petugas pendamping Desa, PKH dan TKSK berjalan dengan baik dan saling mendukung.
2. Monev ke Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan pendamping Desa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
3. Pembinaan rutin kepada Perangkat Desa oleh Kecamatan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat belum bisa memahami pentingnya tentang kelembagaan yang ada di Desa sehingga fungsi lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa belum dimanfaatkan secara optimal.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memberi motivasi kepada lembaga kemasyarakatan yang ada untuk selalu aktif dalam pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dengan sasaran program meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi dan kualitas petugas pelayanan yang baik.
2. Tercukupinya sarana dan prasarana sangat mendukung kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Jaringan Sistem pelayanan yang merupakan kunci dari Pelayanan secara Online.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melaksanakan kegiatan jemput bola layanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kompetensi petugas layanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dengan sasaran program meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan pembinaan kader untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
2. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
3. Melaksanakan Monitoring Evaluasi gabungan antar Kasi dan Kasubbag Kecamatan setiap akhir bulan.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di Desa dan Kecamatan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melaksanakan sosialisasi, Bimtek tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dengan sasaran program meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban dalam mengantisipasi berbagai ancaman Ketenteraman dan Ketertiban.
2. Meningkatkan kerja sama yang semakin baik dengan Forkompincam.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Melaksanakan sosialisasi yang berkesinambungan tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi aman terkendali di masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dengan sasaran program meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa sedikit banyak bisa mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja.
2. Adanya pendampingan dari Kecamatan dalam Penyusunan APBDes/Siskeudes.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJMDes, RKPDDes, APBDes, dan pelaporan berupa LRP, LPPDes, LKPjDes sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari Kecamatan yang semakin tinggi.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Kecamatan telah melakukan pendampingan baik dalam penyusunan APBDes dan pendampingan Siskeudes.
2. Kecamatan telah melaksanakan Pembinaan Administrasi ke Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dengan sasaran program meningkatnya pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan kegiatan sudah tersusun dengan baik.
2. Tersedianya anggaran yang cukup dan perencanaan anggaran kas sudah disusun dengan baik.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan sumber daya agar anggaran yang ada bias dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Patikraja yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Patikraja Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.384.336.605,-	1.300.078.823,-	93,91
2.	Belanja Langsung	591.424.518,-	541.377.311,-	91,54
	Jumlah	1.975.761.123,-	1.841.456.134,-	93,20

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Patikraja
Yang Mendukung Sasaran Program Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Rencana	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.893.984.803	1.764.401.634	93,16
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.114.900	15.535.000	90,77
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.706.000	17.994.500	86,90
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.037.920	4.740.000	94,09
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.917.500	38.785.000	99,66
	JUMLAH	1.975.761.123	1.841.456.134	93,20

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Patikraja tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja 3 sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4	100	1.764.401.634	93,16
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	15.535.000	90,77
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100	17.994.500	86,90
4.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	4.740.000	94,09
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	38.785.000	99,66
	JUMLAH	8	100	1.841.456.134	93,20

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan cukup efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Patikraja.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4	100	93,16	6,84
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	90,77	9,23
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100	86,90	13,10
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	94,09	5,91
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	99,66	0,34
	JUMLAH	8	100	93,20	6,80

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Patikraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Patikraja telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun Provinsi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Patikraja sebagaimana tercantum dalam lampiran

PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KECAMATAN PATIKRAJA TAHUN 2021

No	Nama Lomba	Tingkat	Waktu	Hasil
1.	Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan TP PKK Kec. Patikraja	Kabupaten	21 Desember 2021	Juara Harapan III
2.	Lomba Perpustakaan Desa	Kabupaten	26 Agustus 2021	Juara I

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Patikraja Tahun 2021 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang menghasilkan 3 sasaran dan 9 indikator dengan hasil realisasi kinerja sangat tinggi. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Patikraja, Januari 2022
Camat Patikraja

Drs. LENDRA YUSPI, M.Si.

NIP 19641111 199803 1 002

Lampiran 1

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH
KECAMATAN PATIKRAJA
TAHUN 2021**

No	Nama Lomba	Tingkat	Waktu	Hasil
1	Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan TP PKK Kec. Patikraja	Kabupaten	21 Desember 2021	Juara Harapan III
2	Lomba Perpustakaan Desa	Kabupaten	26 Agustus 2021	Juara I

Patikraja, Januari 2022
Camat Patikraja

Drs. LENDRA YUSPI, M.Si.
NIP 19641111 199803 1 002